

**IDENTIFIKASI PERKEMBANGAN PILOT PROJECT
HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA KAPITA KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

**OLEH
SATRIANI TARRU
M 111 04 715**



23-2-09
kehutan
1 sks
Wardias
18
SICK-KH 09
TAR
C

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Identifikasi Perkembangan Pilot Project Hutan
Kemasyarakatan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala
Kabupaten Jeneponto

Nama : Satriani Tarru

Stambuk : M 111 04 715

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan Pada
Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

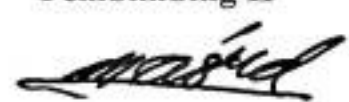
Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS

Tanggal :

Pembimbing II



Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc

Tanggal :



Mengetahui,

Pertanggungjawaban Lengkap Sarjana
Program Studi Manajemen Hutan

MT. Budirman Bachtiar, MS

Tanggal :

ABSTRAK

Satriani Tarru (M 111 04 715). Identifikasi Perkembangan Pilot Project Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dibawah bimbingan Syamsu Alam dan Mas'ud Junus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi masyarakat Kapita baik dari konflik lahan, kelembagaan dan keberhasilan tanaman dalam pengembangan Pilot Project Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Dan untuk mengidentifikasi hasil-hasil yang telah dicapai masyarakat Kapita baik dari aspek pendapatan, kelembagaan dan ekologi dalam pengembangan Pilot Project HKm di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Berlangsung dari bulan September sampai November 2008. Metode pengumpulan sampel dilakukan secara purposive sampling. Sampel yang diambil sebanyak 40 orang. Analisis yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, kualitatif deskriptif, persentase dan tabulasi pada data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan HKm di Desa Kapita adalah konflik lahan, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, rendahnya penerapan teknologi dalam pengelolaan usahatani, kebakaran hutan dan ternak. Dengan adanya Pilot Project pembangunan HKm, masyarakat Kapita telah memperoleh pendapatan dengan rata-rata Rp. 6.238.500/ tahun. Kawasan hutan Desa Kapita sebelum diadakannya Pilot Project HKm yang dahulu tandus, sekarang sudah banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Sedangkan kelompok tani hutan yang dibentuk dalam pengembangan Pilot Project HKm sudah tidak berfungsi sesuai tujuan kelompok tani hutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul “ **Identifikasi Perkembangan Pilot Project Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto**” Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1), untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari beberapa pihak yang terkait, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menghanturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS** sebagai dosen pembimbing I dan bapak **Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc** sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen penguji bapak **Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si** , bapak **Dr. Ir. Roland Alexander Barkey** dan bapak **Ir. H. Usman Arsyad, MS** atas saran dan arahan yang diberikan demi perbaikan skripsi ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan amal Jariyah dari Allah SWT.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda **Tarru, S.pd** dan ibunda **Sarmiati A.ma**. Kalian adalah orang tua terbaikku yang bisa diminta oleh seorang anak. Aku bisa menjadi seperti ini karena kalian berdua, Terima kasih atas semua dorongan positif yang kalian telah ucapkan dengan lembut kepadaku seumur hidupku. Aku telah mendengarkannya,

Aku memperoleh manfaat tidak hanya dari semua yang kalian berikan padaku, Tapi juga dari semua yang tidak bisa kalian berikan kepadaku. Satu amanahmu telah kutunaikan Dan skripsi ini kupersembahkan buat kalian.

2. Adik-adikku tersayang **Husni Thamrin T, Ana pebriana T, Ayu sunarti T.** Dan semua keluarga besarku yang turut mendoakan, Datoku Tersayang, Tante, Sepupu (**Suci, Atu, Mashuri& semuanya**) dan Keponakanku **Moch. AL athir YunQadzun**
3. Teman-teman seperjuanganku di Kampus. **Imelda Sarto, ALfrida NB, La Ode Sahrul, Wantor, Kaharuddin Malik, Abdi Bala, Abd. Qudus, A. Chairul Kalam & Susanti** Kami adalah lapisan-lapisan pelangi terindah yang pernah diciptakan Tuhan untuk mewarnai Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin dan **Ira Syahriani** yang telah memberiku kesempatan menjadi temannya.
4. Sahabat-sahabatku, **ANGELS 02 (Kiki, Uti, Yuki, Mirna) Omba, Vivi, Ettu, Fitri, Marni & Latel's Community** yang telah memberikan persahabatan yang indah dan **Firman Syah Hamra, S.T** yang telah memberikan banyak semangat dan dukungannya.
5. **Dewi Astuti Bur** dengan semua kebersamaannya. Satu pesanku, mungkin Tuhan menginginkan kita bertemu dengan orang yang salah sebelum bertemu dengan orang yang tepat, kita harus mengerti bagaimana berterimakasih atas karunia tersebut.
6. Bapak **Muh. Nur** selaku Kepala Desa Kapita , seluruh masyarakat Desa Kapita dan keluarga besar **Dinas Kehutanan Jeneponto** yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Semua Dosen, Staf dan Pegawai Fakultas Kehutanan dan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin serta seluruh teman-teman yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang telah menyempatkan waktu untuk membaca dan menyimak hasil penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi ini dan bermanfaat bagi kita semua dalam pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya. Amien.

Makassar, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hutan Kemasyarakatan.....	5
B. Tujuan dan Manfaat Hutan Kemasyarakatan.....	7
C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Mengelolah Hutan Kemasyarakatan..	9
D. Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	10
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat.....	15
B. Metode Pengumpulan Data.....	15
C. Analisis Data	17
D. Kerangka Pikir Penelitian	19
E. Konsep Operasional.....	21
BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	23
1. Letak Wilayah dan Geografis	23
2. Keadaan Iklim	24

3. Jenis Keadaan Topografi jenis Penggunaan Tanah.....	25
B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya.....	26
1. Keadaan Penduduk	26
2. Mata Pencaharian	28
3. Pendidikan.....	29
4. Agama dan Adat Istiadat.....	30
5. Kelembagaan.....	31

BAB V. HASIL DAN PEMABAHASAN

A. Kendala-kendala yang dihadapi Dalam Pengembangan HKm	32
1. Konflik Lahan	32
2. Kelembagaan.....	34
a. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Pemerintah	34
b. Rendahnya Penerapan Teknologi dan Pengelolaan Usahatani.....	34
3. Keberhasilan Tanaman	35
a. Kebakaran Hutan	35
b. Ternak.....	36
B. Identitas Anggota KTH/ Responden.....	37
1. Umur.....	37
2. Tingkat Pendidikan.....	38
3. Jumlah Tanggungan Keluarga.....	39
4. Luas Lahan.....	41
C. Hasil Kegiatan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan.....	42
1. Pendapatan dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan.....	42
2. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peserta HKm.....	43
a. Struktur Organisasi Kelompok Tani Hutan	43
b. Aturan-aturan Intern Kelompok Tani Hutan.....	44
c. Hubungan Kerja Sama Antar Kelompok Tani Hutan.....	51
3. Ekologi.....	54
a. Aspek Vegetasi.....	54
b. Teknik Konservasi Tanah	55

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Rata-rata curah hujan setiap bulan di Desa Kapita kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto Tahun 2007	24
2.	Luas lahan dan penggunaannya di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2000.....	25
3.	Jumlah penduduk menurut golongan usia dan jenis kelamin di Desa Kapita Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2000.....	26
4.	Jumlah penduduk menurut golongan usia dan jenis kelamin di Desa Kapita Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.....	27
5.	Jenis mata pencaharian penduduk di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.....	28
6.	Tingkat pendidikan penduduk di Desa Kapita Kecamatan Bangkal, Kabupaten Jeneponto, 2008.....	29
7.	Jenis dan jumlah kelembagaan masyarakat Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008	31
8.	Kendala-kendala dalam Pengembangan hutan kemasyarakatan.....	32
9.	Klasifikasi responden berdasarkan kategori umur di Desa kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto,2008	37
10.	Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008	38
11.	Klasifikasi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga di Desa Kapita Kecamatan bangkala, Kabupaten Jeneponto,2008.....	40

12.	Luas lahan yang dikelola masyarakat di dalam kawasan hutan kemasyarakatan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2003.....	41
13.	Nilai penerimaan, biaya produksi, dan pendapatan bersih responden per Tahun di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto,2008.	42
14.	Jumlah pelaksana rapat dalam KTH di desa Kapita, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.....	52
15.	Jenis vegetasi yang terdapat di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.....	55

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Skema kerangka pikir penelitian.....	20
2.	Struktur organisasi kelompok tani hutan kemasyarakatan.....	44
3.	Pola tanam di lokasi HKm.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks	Halaman
1.	Identitas responden di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono,	61
2.	Pendapatan responden Per Tahun di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jenepono	62
3.	Gambar vegetasi dan bentuk konservasi tanah di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jenepono	63
4.	Gambar kawasan hutan sebelum dilaksanakannya Pilot Project HKM di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jenepono	65
5.	Kendala-kendala dalam pengembangan hutan kemasyarakatan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jenepono	66
6.	Gambar/Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan beberapa Responden.	68
7.	Qusioner penelitian untuk kelompok tani hutan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jenepono.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 37/ Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan disebutkan bahwa hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya untuk memberdayakan masyarakat setempat. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi dimasyarakat. Dan hutan kemasyarakatan berazaskan manfaat dan lestari secara ekologi, sosial dan budaya, musyawarah-mufakat dan keadilan.

Paradigma baru pembangunan kehutanan yang berkembang memberikan arahan bahwa praktek pengelolaan hutan harus berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan peluang usaha pada masyarakat yang berada disekitar hutan. Sehingga paradigma yang terlalu menekankan "*economic growth based development*" sudah bergeser menjadi "*Resources based development*" dan "*community based development*". Salah satu wujud dari "*community based development*" adalah pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Melalui pembangunan hutan kemasyarakatan ini, maka masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan diperlakukan dan diakui sebagai

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ekosistem hutan yang harus mendapat perhatian secara seimbang dalam upaya untuk lebih menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.

Dalam rangka meletakkan landasan operasional dari "*community Based Develoment*" ini, maka pemerintah (Depertemen Kehutanan dan Perkebunan) telah menetapkan sejumlah kebijakan, antara lain melalui SK Menhut No. 677/Kpts-II/98. Kebijakan ini pada hakekatnya memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat di sekitar hutan untuk turut mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya hutan. Berkaitan dengan hal ini, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa lahan-lahan hutan tersebut berada di dekat atau disekitar pemukiman masyarakat yang pada umumnya sudah mengalami kerusakan. Dengan demikian, penerapan kebijakan termaksud di atas menuntut adanya penciptaan prakondisi kelembagaan sosial maupun dalam wujud perbaikan potensi dan kondisi sumberdaya hutan melalui rehabilitas.

Pada tahun 1998/1999 Depertemen Kehutanan melalui Balai Rehabilitas Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) Jeneberang-Walanae melaksanakan Pilot Project Pembangunan HKm seluas 2500 ha di 3 lokasi yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Maros dan Kabupaten Jeneponto yang pembiayaannya diperoleh dari Sektor Program Loan OECF-INP 22. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data dan informasi dari hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilaksanakan secara partisipatif. Desa Kapita, Kecamatan Bangkala merupakan salah satu desa yang dijadikan Pilot Project HKm yang ada di Jeneponto. Adapun yang melatarbelakangi

kegiatan tersebut karena kerusakan sumberdaya hutan, tingginya tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan. Dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai pelaku utama pengelola hutan guna meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan Jenepono, sebelum diadakannya Pilot Project Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Desa Kapita merupakan kawasan hutan lindung yang tandus dan gersang yang dijadikan masyarakat sebagai kawasan pengembalaan sehingga masyarakat tidak memperoleh pendapatan dalam kawasan HKm. Jadi, dengan adanya pembangunan Pilot Project HKm di Desa Kapita maka diharapkan mampu memberikan pengembangan dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Maka penulis menganggap perlu melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Perkembangan Pilot Project Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jenepono.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakatan Kapita baik dari konflik lahan, kelembagaan dan keberhasilan tanaman dalam pengembangan Pilot Project HKm di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
2. Mengidentifikasi hasil-hasil yang telah dicapai oleh masyarakat Kapita baik dari aspek pendapatan, kelembagaan dan ekologi dalam pengembangan Pilot Project HKm di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan HKm secara berkelanjutan di Desa Kapita dengan tetap berpedoman pada prinsip kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hutan Kemasyarakatan

Di dunia internasional, istilah *community forestry* secara sederhana berarti pengelolaan sekumpulan pepohonan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Pada umumnya, *community forestry* digunakan dalam dunia kehutanan dengan pengertian yang sama dengan *social forestry* (perhutanan sosial), sementara di sisi lain dibedakan dari istilah *farm forestry* yang merujuk pada pengelolaan pohon-pohonan oleh pengelola lahan individual. (Anonim 2008).

Community forestry dapat mencakup praktek-praktek pengelolaan hutan yang telah berumur ratusan tahun sampai ke skema-skema inovatif yang relatif baru berkembang. Pengelolaan hutan tanaman maupun hutan alam (termasuk lahan belukar) dan semua macam metode pengorganisasian kelompok masyarakat pengelola hutan. (Anonim 2008)

Sonja Vermeulen (2001) memberikan gambaran pengertian *community forestry* dari persepsi para pihak yaitu :

1. Definisi pemerintah

Community forestry adalah sistem kehutanan yang didesain dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, rumah tangga dan lingkungan lokal dan untuk mengembangkan ekonomi lokal.

2. Definisi peneliti

Community forestry berbasis pada penguasaan lokal dan pemanfaatan keuntungan dari sumberdaya hutan lokal. Keuntungan-keuntungan itu bukan semata bersifat moneter dan bukan pula semata dari produksi kayu, namun dapat bervariasi menurut banyaknya nilai manfaat yang bisa didapat dari ekosistem hutan, termasuk nilai-nilai kultural, spiritual, sosial, kesehatan, ekologis, rekreasional, estetika dan ekonomi.

3. Definisi local

Pengelolaan masyarakat atas hutan telah mengubah konsep kehidupan masyarakat. Warga desa tidak lagi berpikir soal manfaat perorangan, namun lebih pada manfaat kolektif. Kami gunakan dana yang diperoleh dari pengelolaan hutan untuk pembangunan di masyarakat, seperti memperbaiki jalan-jalan dan penyediaan air minum.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1999 tentang hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan mensejahterakan masyarakat. Dalam ketentuan ini, terdapat paradigma baru yaitu adanya pengusahaan hutan kemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaat.
2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem pengusahaan.
3. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan.
4. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak.
5. Kelembagaan pengusahaan ditentukan oleh masyarakat.
6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya.

B. Tujuan dan Manfaat Hutan Kemasyarakatan

Tujuan kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah:

1. Meningkatkan daya dukung lahan.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terhadap pelestarian isik wilayah dan sumberdaya alam hutan.
3. Tumbuhnya sikap dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian sumberdaya alam hutan.
4. Lestarinya sumberdaya alam hutan dengan segala fungsinya (Anonim, 1986).

Selanjutnya (Soerjono, 1986) mengemukakan bahwa hutan kemasyarakatan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

1. Meningkatkan interaksi antara hutan masyarakat yang mantap.
2. Meningkatkan mutu hutan dan mutu masyarakat di sekitar hutan secara serasi.

Tujuan mikro dalam peningkatan mutu hutan antara lain :

1. Meningkatkan produktivitas lahan hutan.
2. Meningkatkan rehabilitas hutan
3. Meningkatkan nilai tambah dari hutan.
4. Berkembangnya hutan rakyat.

Dari segi masyarakat, tujuan itu adalah :

1. Meningkatnya lapangan kerja
2. Meningkatnya kondisi umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti keterampilan, kesempatan berusaha, keadilan dan lingkungan sehat.
3. Hutan kemasyarakatan dan masyarakat petani.

Hutan kemasyarakatan relative masih baru dalam konsep pembangunan hutan di Indonesia (Sathapraja, 1982). Karena hal tersebut bersifat inovasi maka untuk bisa diterima petani, inovasi tersebut harus bisa menunjukkan hasil yang lebih baik dari cara pengelolaan yang sedang dilakukan oleh petani. Faktor yang sangat menentukan adalah keserasian inovasi tersebut dengan kondisi fisik wilayah dan keadaan sosial ekonomi petani (Marwan, 1988).

Masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan umumnya memandang hutan sebagai tempat masyarakat untuk memenuhi 1. Kebutuhan fisiknya: makanan, bahan bakar, tempat berteduh, obat-obatan dan alat untuk kebutuhan rumah tangga, 2. kebutuhan sosialnya: ruang individu, keluarga dan masyarakat, 3. Kebutuhan spiritualnya: tempat keramat, tempat pemakaman dan rumah ibadah, 4. Kebutuhan ekonominya: hasil hutan, bahan baku dan kesempatan kerja (Ritchie, *et.al*,2001).

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan sebagian besar dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan member manfaat berupa tambahan pendapatan dari hasil hutan (kayu) atau non kayu, penyediaan buah-buahan, kayu untuk bahan bakar, bahan untuk rumah atau perkakas rumah tangga (Suharjito, 2000).

C. Kendala-kendala yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Soerjono (1986) mengemukakan bahwa di dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan, institusi desa kurang membantu di dalam mengembangkan interaksi antara masyarakat dan hutan, bentuk hutan bermutu rendah dan tingkat produktivitas yang semakin rendah pula, lahan pedesaan juga dalam keadaan kritis, terutama tanah pertanian kering. Selanjutnya dikemukakan bahwa kebijaksanaan pemerintah dalam pemanfaatan lahan bertolak pada tiga kriteria yaitu : peningkatan daya dukung lahan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan penduduk, pengawetan dan pelestarian sumber terutama tanah dan air, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Disamping hubungan lintas disiplin profesi kehutanan dan

respons partisipasi masyarakat maka terdapat hubungan yang bersifat timbal balik yaitu interaksi antara kepentingan kehutanan disekitar hutan terutama dalam ikut memanfaatkan hutan.

Kendala yang sering menyebabkan kegagalan pelaksanaan program kehutanan di dalam masyarakat adalah kurangnya pendelegasian wewenang ke bawah untuk dapat menangani persepsi, motivasi dan nilai-nilai petani atau masyarakat pedesaan yang cukup bervariasi disamping berkurangnya kemampuan petugas untuk menangani masalah tersebut (Soerjono, 1986).

D. Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2007 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta pemanfaatan hutan pada Pasal 2 yang berbunyi “ Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan”. Dimana Pengelolaan hutan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- b. Pemanfaatan hutan.
- c. Penggunaan kawasan hutan.
- d. Rehabilitasi dan reklamasi hutan serta.
- e. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengaturan mengenai penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam, diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menurut penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 2 adalah Bahwa Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara

terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 ada beberapa pilihan bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan. Beberapa pilihan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus (Pasal 34). Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus adalah pengelolaan dengan tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan social budaya dan penerapan teknologi tradisional (*indigenous technology*). Untuk itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (*indigenous institution*), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem. Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus ini diberikan kepada masyarakat adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan. Sebelum UU 41/1999 ada, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Krui dalam kawasan hutan dengan tujuan istimewa (Kepmenhut N. 47/Kpts – II/1998).
2. Hutan desa (penjelasan Pasal 5 ayat 1). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Tidak ada penjelasan lebih jauh dari UU 41/99 tentang hutan desa ini, sehingga memungkinkan untuk diinterpretasikan lebih luas.

3. Hak pemungutan hasil hutan oleh masyarakat adat (Pasal 67 ayat 1). Hak pemungutan hasil hutan oleh masyarakat adat dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
4. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utama ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (penjelasan Pasal 5 ayat 1). Pengaturan mengenai hutan kemasyarakatan ini telah ada sebelum UU 41/99 lahir dan sudah mengalambeberapakali perubahan.

Peraturan mengenai HKM yang terakhir adalah Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001. Pada dasarnya HKM adalah hak pengelolaan hutan negara yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan jangka waktu tertentu di semua fungsi kawasan hutan baik fungsi produksi maupun fungsi konservasi.

Menurut Prakoso, (1995) setidaknya terdapat tiga asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (Rural community) dan pembangunan pedesaan (Rural development) adalah :

1. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan.
2. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus menintegrasikan dengan sektor pertanian dan perlu faktor-faktor diluar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan.

3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat disekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan yang dilaksanakan pada bulan September sampai November di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Metode Pengumpulan Data.

1. Metode Pengambilan Sampel.

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling terhadap masyarakat yang mengelola kawasan HKm di Desa Kapita untuk dijadikan sebagai responden. Adapun jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 40 orang.

2. Pengumpulan Data

Guna memperoleh data, informasi, dan keterangan untuk penelitian, maka dikumpulkan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan/Quisioner yang telah disiapkan dan observasi lapangan. Adapun data primer terdiri atas:
 1. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan HKm.
 2. Identitas responden
 3. Bentuk-bentuk pemanfaatan kawasan hutan oleh responden,

4. Pendapatan dalam kawasan HKm.
 5. Pengumpulan data kelembagaan HKm di Desa Kapita.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dimana data tersebut dapat diperoleh dari laporan- laporan, data kelurahan, data dari instansi atau lembaga yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Data ini meliputi :
1. Kondisi fisik wilayah (luas, letak wilayah dan geografis, iklim, keadaan topografi dan jenis penggunaan tanah)
 2. Keadaan sosial ekonomi (jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan sarana/prasarana).
 3. Strukur organisasi dan aturan-aturan intern kelompok tani hutan
 4. Serta data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Analisis Data.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis sebagai berikut :

1. Pendapatan bersih dalam kawasan HKm.

Pendapatan bersih yaitu selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Pendapatan bersih dianalisis dengan menggunakan teknik kuantitatif deskriptif dengan menggunakan rumus :

$$Pb = Tp - Tb$$

Keterangan :

Pb : Pendapatan bersih

Tp : Total penerimaan

Tb : Total biaya produksi.

2. Kelembagaan kelompok tani hutan.

Data yang menyangkut kelembagaan kelompok tani hutan meliputi struktur organisasi, aturan-aturan intern kelompok tani hutan dan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan dalam menjalankan kelembagaan seperti rapat, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dan tabulasi/persentase.

3. Ekologi

Data mengenai aspek ekologi yang akan diteliti dalam penelitian ini menyangkut tentang vegetasi dan teknik konservasi tanah seperti di bawah ini:

- a. Pada aspek vegetasi yang akan diteliti adalah jenis vegetasi yaitu vegetasi jenis spesies dan pengelompokannya yang dianalisis secara kualitatif deskriptif dan tabulasi sesuai hasil wawancara dengan responden dan melihat langsung dilapangan yang diperkuat dengan gambar/dokumentasi yang diperoleh dilokasi HKm.
- b. Pada teknik konservasi tanah yang akan diteliti adalah jenis teknik konservasi tanah dan penerapannya dengan cara melihat langsung dilapangan dan diperkuat dengan gambar /dokumentasi.

Selain data di atas peneliti juga mengidentifikasi perkembangan HKm dalam aspek ekologi dengan cara melihat perbandingan hasil gambar/dokumentasi sebelum dan setelah dilaksanakannya pembangunan HKm di Desa Kapita.

4. Kendala-kendala dalam perkembangan HKm.

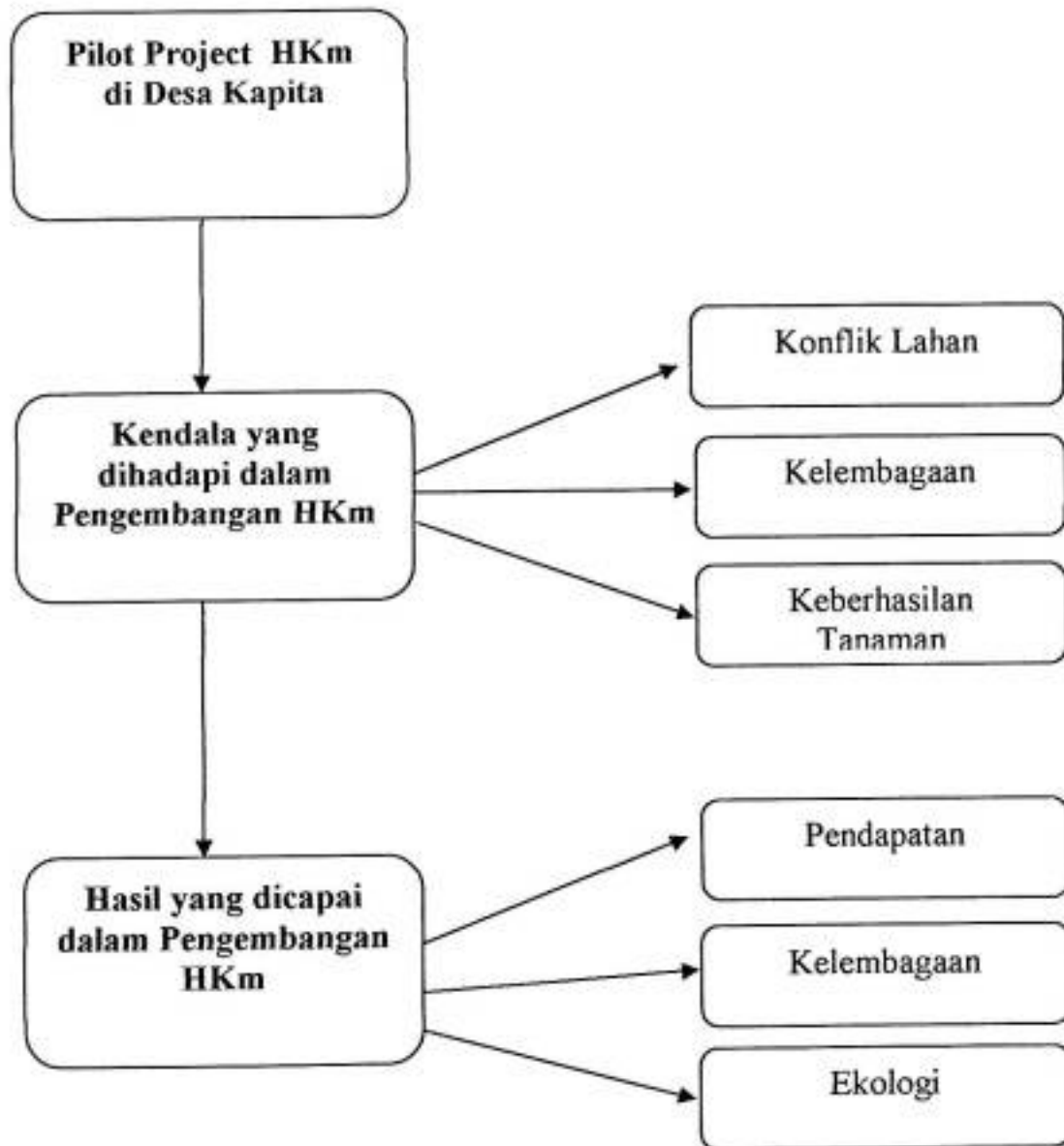
Data tentang kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan HKm, dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan tabulasi/persentase untuk menggambarkan dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan HKm dilihat dari konflik lahan, dimana pada konflik lahan yang akan diteliti tentang jenis konflik dan bagaimana penyelesaiannya. Pada kelembagaan yang akan diteliti adalah kelemahan dari pihak masyarakat di Desa Kapita dalam menjalankan kelompok tani hutan tersebut dan dalam keberhasilan tanaman yang akan diteliti adalah kendala yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan tanaman.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Desa Kapita merupakan salah satu desa yang dijadikan sebagai Pilot Project pembangunan HKm yang ada di Jenepono. Adapun yang melatarbelakangi kegiatan tersebut karena kerusakan sumberdaya hutan, tingginya tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan.

Dalam pembangunan Pilot Project HKm di Desa Kapita ada kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengembangannya. Adapun kendala-kendala yang ingin dilihat pada penelitian ini adalah konflik lahan, kelembagaan dan keberhasilan tanaman.

Setelah kendala-kendala tersebut telah diketahui peneliti juga akan melihat hasil-hasil yang diperoleh masyarakat dalam pengembangan Pilot Project HKm. Adapun hasil yang ingin dilihat mulai dari aspek pendapatan, kelembagaan, dan ekologi. Secara sistimatis kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.

E. Konsep Operasioanal

Konsep operasional adalah ruang lingkup atau batasan istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, untuk menghindari perbedaan-perbedaan persepsi. Beberapa istilah dengan batasan pengertiannya dituliskan sebagai berikut:

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan keberadaannya sesuai dengan hutan tetap.
2. Kelembagaan adalah sekumpulan ketentuan yang mengatur hubungan antara individu manusia yang memberikan batasan haknya, mengenali hak individu lainnya, hak istimewa dengan disertai tanggung jawab.
3. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
4. Bentuk pemanfaatan kawasan hutan adalah macam-macam aktivitas dan alokasi waktu pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat.
5. Purposive Sampling adalah pengambilan sample berdasarkan kesengajaan sesuai ciri dan sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan yang akan diteliti.
6. Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya. Konflik dapat terjadi antar kelompok masyarakat/antar individu dikalangan masyarakat, yang biasa disebut konflik horizontal. Sedangkan konflik

vertikal terjadi antara masyarakat dengan berbagai pihak diluarnya yang dianggap memiliki otoritas dalam mengelola sumber daya hutan. Pihak-pihak luar yang dimaksud antara lain : pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha hutan swasta dan BUMN, serta aparat keamanan.

7. Pendapatan bersih yaitu selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi.



BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah

1. Letak Wilayah dan geografis

Desa Kapita merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak kurang lebih 10 km dari Ibukota Kecamatan dan kurang lebih 39 km dari Ibukota Kabupaten serta kurang lebih 73 km dari Ibukota Propinsi. Luas wilayah Desa Kapita 2.181 km² yang terdiri dari 7 dusun yaitu Tompo Balang, Balang Makkai, Paranga, Maccini Baji, Tombololoe, Pokanga dan Bonto Biraeng, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Marayoka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulusuku Kecamatan Tamalatea.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalimporo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Silanu.

2. Keadaan Iklim

Keadaan iklim Desa Kapita tidak terpisahkan dengan kecamatan Bangkala karena Desa Kapita merupakan satu wilayah Kecamatan Bangkala, sehingga untuk memperoleh data curah hujan desa Kapita diambil data curah hujan secara umum di wilayah. Dan diperoleh data curah hujan pada tahun 2007. Untuk lebih jelasnya rata-rata curah hujan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Rata-rata Curah Hujan Setiap Bulan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto Tahun 2007.

No	Bulan	Hari hujan	Curah hujan
1	Januari	15	323
2	Pebruari	16	281
3	Maret	11	90
4	April	13	168
5	Mei	5	72
6	Juni	9	174
7	Juli	1	-
8	Agustus	1	-
9	September	-	-
10	Oktober	5	91
11	November	7	129
12	Desember	21	548
Jumlah			1.876
Rata-rata			156.33

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 2008.

3. Keadaan Topografi Jenis Penggunaan Tanah

Secara umum keadaan topografi Desa Kapita merupakan wilayah dataran dan perbukitan atau dikelilingi oleh pegunungan sehingga keadaan tanahnya baik cocok untuk daerah pertanian dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Luas Lahan dan Penggunaannya di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2000.

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Tanah sawah	34,60	1,58
2	Tegalan	410,53	18,82
3	Pekarangan	13,75	0,63
4	Hutan/ Kebun	1.697	77,81
5	Kolam/Tambak	-	-
6	Padang Rumput	-	-
7	Lain-lain	25,12	1,15
Jumlah		2.181	100

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Kapita Kabupaten Jeneponto, 2000.

Pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jenis lahan yang terbanyak digunakan adalah hutan/kebun sebesar 1.697 ha atau 77,81 % dan yang terendah adalah pekarangan sebesar 17,5 Ha atau 0,63 %. Dengan melihat data tersebut masyarakat Desa Kapita lebih dominan menanam tanaman perkebunan.

B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya

1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kapita pada tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin di Desa Kapita Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2000.

No	Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1.	0 – 12 bulan	23	31	54	1,41
2.	1 – 4	40	43	83	1,76
3.	5 – 6	141	150	291	6,16
4.	7 – 12	421	430	851	18,01
5.	13 – 15	243	353	596	12,61
6.	16 – 18	240	245	485	10,26
7.	19 – 25	300	310	610	12,91
8.	26 – 35	275	280	555	11,75
9.	36 – 45	150	192	342	7,24
10.	46 – 50	210	223	433	9,16
11.	51 – 60	110	120	230	4,87
12.	61 – 75	75	71	151	3,19
	> 76	18	22	34	0,72
Total		2.245	1.580	4.725	100

Sumber : Kantor Desa Kapita Kabupaten Jeneponto, 2000.

Jumlah penduduk Desa Kapita pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin di Desa Kapita Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.

No	Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1.	0 – 4	250	172	422	8,28
2.	5 – 9	157	201	358	7,02
3.	10 – 14	320	389	709	13,92
4.	15 – 19	207	449	656	12,88
5.	20 – 24	287	264	551	10,82
6.	25 – 29	209	370	579	11,37
7.	30 – 34	160	227	387	7,60
8.	35 – 39	132	239	371	7,28
9.	40 – 44	127	139	266	5,22
10.	45 – 49	100	99	199	3,90
11.	50 – 54	87	76	163	3,20
12.	55 – 59	79	68	147	2,89
13.	60 – 64	60	54	114	2,24
14.	> 65	52	68	120	2,36
Total		2.297	2.815	5.094	100

Sumber : Kantor Desa Kapita Kabupaten Jeneponto, 2008.

Table 3 dan 4 di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk masyarakat Kapita terus meningkat setiap tahun, dan pertambahan penduduk dari tahun 2000 sampai 2008 sebanyak 369 jiwa. Hal ini disertai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto disajikan pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Jenis Mata Pencaharian Penduduk di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	1.090	72,38
2	Nelayan/ Tambak	-	-
3	Peternak	166	11,02
4	Pedagang	111	7,37
5	Industri	17	1,12
6	Sopir Angkutan	82	5,44
7	PNS/ABRI	29	1,92
8	Jasa	14	0,92
Jumlah		1.506	100

Sumber : Kantor Desa Kapita Kabupaten Jeneponto, 2008.

Pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang bermata pencaharian terbanyak adalah sebagai petani berjumlah 1.090 jiwa atau 72.23 % dan yang terendah adalah jasa berjumlah 14 jiwa atau 0.90 %. Dari data tersebut menandakan bahwa penduduk Desa Kapita mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani.

3. Pendidikan.

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan masyarakat, tingkat pendidikan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan masyarakat dalam melaksanakan usahatani. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk yang ada di Desa Kapita, Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Kapita Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	SD	1.118	52,61
2.	SLTP	557	26,21
3.	SLTA	406	19,10
4.	Akademi (D1 – D3)	23	1,08
5.	Sarjana (S1– S2)	21	0,98
Jumlah		2.125	100

Sumber : Badan Statistika Kabupaten Jeneponto, 2008.

Tabel 6 menunjukkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat dilokasi pembangunan Hutan Kemasyarakatan relatif rendah. Hal ini ditandai dengan rasio yang cukup tinggi antara jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SD hingga SLTA.

4. Agama dan Adat istiadat

Dari jumlah 5.094 jiwa penduduk Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto seluruhnya memeluk agama islam. Hal ini merupakan indikasi kuatnya pengaruh ajaran islam di daerah tersebut. Seperti pada kegiatan pembangunan HKm, pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat sering memberikan motivasi kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan HKm.

Adat istiadat di Desa Kapita masih diwarisi secara turun temurun dalam hal pola penggunaan lahan. Pada umumnya mereka memanfaatkan lahan hutan dengan tanaman jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi mereka. Disamping itu, mereka juga memanfaatkan kayu-kayuan untuk kayu bakar dan kayu ramuan rumah.

Pada dasarnya mereka memanfaatkan hutan dengan sistem tradisional, baik dalam hal teknik budidaya, maupun dalam hal penebangan pohon untuk bahan-bahan bangunan. Penebangan yang mereka lakukan biasanya tidak disertai dengan penanaman kembali untuk mengganti pohon yang sudah ditebang.

5. Kelembagaan

Kelembagaan baik yang formal maupun non formal merupakan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang diharapkan bermanfaat untuk lebih memberdayakan anggota masyarakat, berperan aktif dalam kegiatan pembangunan masyarakat umumnya serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan anggota masyarakat. Lembaga formal dan non formal yang terdapat di Desa Kapita dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Jenis dan Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.

No	Jenis Kelembagaan	Desa Kapita (buah)
1	LKMD	1
2	PKK	1
3	Karang Taruna	1
4	Kelompencapir	1
5	Posyandu	1
6	Kelompok Tani	17
7	Kelompok Dasa Wisma	1
8	Kelompok Remaja Mesjid	7
9	KUD	-
Jumlah		30

Sumber : Kantor Desa Kapita Jeneponto, 2008.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan.

Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi masyarakat dalam pengembangan hutan HKM di desa Kapita dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Kendala-kendala dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan.

No	Kendala-kendala dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Jenis Kendala	Jumlah Responden (orang)	Jumlah (%)
1	Konflik Lahan	Status Lahan	17	42,5
2.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan terhadap pemerintah. • Rendahnya kemampuan teknologi dan pengelolaan usaha tani 	32 15	80 37,5
3.	Keberhasilan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Ternak • Kebakaran Hutan 	40 40	100 100

1. Konflik lahan

Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya. Konflik dapat terjadi antar kelompok masyarakat/antar individu dikalangan masyarakat, yang biasa disebut konflik horizontal. Sedangkan konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan berbagai pihak diluarnya yang dianggap memiliki otoritas dalam mengelola sumber daya hutan. Pihak-pihak luar yang dimaksud antara lain :

pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha hutan swasta dan BUMN, serta aparat keamanan.

Berdasarkan hasil penelitian pada konflik lahan di Kawasan HKm di Desa Kapita terdapat 17 orang atau sebanyak (42,5%) responden yang mengatakan letak permasalahan yang terjadi dalam pengembangan HKm di Desa Kapita adalah mengenai status lahan. hal ini disebabkan karena pal batas yang ada di Kawasan HKm merupakan pal batas sementara, yang hanya dibuat oleh petani (pantok kayu), bukan merupakan pal batas yang paten (beton). Sehingga sering terjadi pertengkaran antara masyarakat yang satu dengan yang lain tentang pal batas tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, jenis konflik ini disebut juga konflik horizontal. Dan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan yang melibatkan segenap orang-orang penting dalam desa tersebut seperti : kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dengan mengeluarkan surat perjanjian yang isinya sudah menjadi kesepakatan bersama.

2. Kelembagaan.

a. Ketergantungan Masyarakat terhadap Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa anggota kelompok tani hutan dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan cenderung masih tergantung kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah/desa dan pihak kehutanan sebagai pelaksana. Masyarakat belum bisa mandiri dan berdiri sendiri karena setiap pelaksanaan kegiatan kelembagaan selalu ingin mendapat dukungan dari pemerintah, Dukungan itu baik berupa finansial, teknis atau dukungan semangat dan perhatian. Dan apabila dukungan tersebut hilang maka mereka pun akan sangat sulit melaksanakan kegiatannya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 32 responden atau sekitar (80%) yang berasumsi bahwa ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu kendala.

b. Rendahnya Penerapan Teknologi dan Pengelolaan Usahatani

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan HKm di Desa Kapita adalah rendahnya penerapan teknologi dan pengelolaan usahatani anggota KTH yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang sebahagian besar hanya sampai sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 15 responden atau (37,5%) yang mengatakan bahwa sumber permasalahan pengembangan HKm dalam kelembagaan juga terdapat pada rendahnya kemampuan teknologi dan pengelolaan usahatani masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan sulitnya memberi pemahaman tentang teknologi dan usahatani yang lebih maju. Oleh

karena itu diharapkan adanya penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara terus menerus sehingga dapat memberikan informasi tentang metode dan teknik fasilitas yang akan diberikan kepada anggota kelompok tani hutan.

3. Keberhasilan Tanaman

Tantangan keamanan terhadap hewan-hewan ternak tidak dapat dicegah karena lokasi HKm merupakan bekas ladang penggembalaan. Sanchez (1992) mengatakan bahwa penggembalaan berlebihan dipadang rumput berakibat beberapa tempat menjadi gundul dan jalan setapak memadat akhirnya terbentuk alur-alur yang dalam. Untuk mengatasi tanah yang memadat, tanaman jenis umbi-umbian merupakan tanaman yang dapat membantu pembongkaran yang lebih baik diakibatkan oleh kegiatan penggembalaan. Tanaman HKm bahkan mati karena dampak terjadinya fenomena alam yaitu terjadinya kebakaran pada saat musim kemarau. Berdasarkan hasil penelitian ada dua kendala dalam keberhasilan tanaman yaitu :

a. Kebakaran hutan

Hasil penelitian menunjukkan seluruh responden berasumsi bahwa letak permasalahan dalam pengembangan HKm di Desa Kapita adalah kebakaran hutan. Hal ini disebabkan karena di Desa kapita sering terjadi kebakaran hutan bahkan kebakaran hampir terjadi setiap tahun yang dapat merusak tanaman. Untuk itu dibutuhkan kerja sama antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah setempat dalam penanggulangan kebakaran pada kawasan HKm.

b. Ternak

Hasil penelitian menunjukkan seluruh responden berasumsi bahwa faktor penghambat dari keberhasilan tanaman adalah ternak. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat besar karena masyarakat Desa Kapita memiliki ternak yang hanya di lepas begitu saja, tanpa adanya kesadaran bagi masyarakat untuk mengandangkan ternaknya dan mengakibatkan tanaman pada kawasan HKm dijadikan sebagai tempat pencarian makanan oleh ternak tersebut.

Beberapa alasan masih terkendala dalam ternak adalah:

6. Seluruh masyarakat Desa Kapita masih memiliki ternak, baik itu sebagai bahan makanan ataupun untuk dijual dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
7. Sebahagian besar petani masih menggunakan ternak dalam menggarap sawahnya.
8. Masih banyak masyarakat yang menggunakan ternak seperti kuda dan sapi sebagai alat transportasi.

B. Identitas Anggota KTH/Responden

1. Umur

Umur responden adalah jangka waktu dalam tahun kelahiran sampai saat penelitian dilaksanakan. Menurut Sajogyo (1977) bahwa usia produktif dibagi menjadi usia produktif muda dan usia produktif tua. Penggolongan umur 15 – 34 tahun disebut usia produktif muda, 35 – 54 tahun disebut usia produktif tua dan diatas 55 tahun disebut usia non produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. Klasifikasi Responden Berdasarkan Kategori Umur di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.

No	Klasifikasi Umur (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	15 – 34	8	20
2	35 – 54	29	72,5
3	≥ 55	3	7,5
Jumlah		40	100

Tabel 9 di atas, menunjukkan bahwa responden dengan usia produktif tua yaitu sebesar 72,5 % atau sebanyak 29 responden, usia produktif muda sebesar 20% atau sebanyak 8 responden dan usia non produktif sebesar 7,5 % sebanyak 3 responden. Hal di atas menunjukkan bahwa masih ada responden yang bekerja meskipun usianya sudah tidak produktif lagi hal ini disebabkan karena besarnya tuntutan ekonomi untuk terus bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu sebahagian besar responden adalah usia produktif tua. Dimana pada usia produktif tua dianggap produktif karena diasumsikan memiliki pengalaman dan tenaga yang

kuat dalam berusaha tani sehingga semakin banyak jumlah usia produktif tua semakin dapat meningkatkan pendapatan. (Fitriani, 2008). Berdasarkan hasil penelitian maka teori diatas sejalan pada penelitian di Desa Kapita. Karena dengan banyaknya usia produktif tua maka pendapatannya pun semakin meningkat.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden akan berpengaruh dalam pengelolaan hutan dalam meningkatkan jumlah produksi dan juga pendapatan yang akan diterimanya. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini :

Tabel 10. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Buta Huruf	1	2.5
2	SD	22	55
3	SMP	8	20
4	SMA	8	20
5	Perguruan Tinggi	1	2.5
Jumlah		40	100

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden masih tergolong rendah yaitu buta huruf sebesar 2,5% atau sebanyak 1 responden, SD sebesar 55% sebanyak 22 responden, SMP dan SMA sebesar 8 % sebanyak 8 orang dan untuk perguruan tinggi sebesar 2,5% atau sebanyak 1 responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden di Desa Kapita tergolong masih

sangat rendah karena sebagian besar responden hanya sampai SD bahkan ada yang buta huruf.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap cara penerimaan akan inovasi baru yang dianjurkan dalam guna meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan taraf hidup dari petani itu sendiri. (Fitriani, 2008). Kenyataannya, teori di atas tidak mendukung pada hasil penelitian di Desa Kapita karena meskipun tingkat pendidikan responden sebagian besar sampai SD bahkan ada yang buta huruf, namun mereka mampu meningkatkan pendapatannya dalam kawasan HKm.

3. Jumlah Tanggungan Keluarga.

Besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi kinerja dari responden. Semakin besar jumlah tanggungan keluarga maka kinerja petani akan lebih banyak karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang besar. Klasifikasi jumlah tanggungan keluarga responden di Desa Kapita di dasarkan atas 3 kategori, yaitu kategori kecil jika jumlah tanggungan keluarga 2 – 4 orang, kategori menengah 5 – 7 orang dan kategori besar jika jumlah tanggungan keluarga > 7 orang. Jadi klasifikasi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini :

Tabel 11. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga di Desa Kapita Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.

No	Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	2 – 4	36	90
2	5 – 7	3	7,5
3	> 7	1	2,5
Jumlah		40	100

Tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa sebahagian besar responden mempunyai jumlah tanggungan keluarga 2 – 4 orang sebanyak 36 responden atau sekitar 90%, jumlah tanggungan keluarga 5 – 7 orang sebanyak 3 responden atau sekitar 7,5 %, sedangkan jumlah tanggungan keluarga > 7 orang hanya 1 responden atau sekitar 2,5%.

Jumlah anggota keluarga yang lebih banyak dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga dapat membantu dalam mengelolah usaha tani berupa bantuan tenaga kerja (Firiani, 2008). Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kapita, banyaknya jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Karena meskipun sebahagian besar responden memiliki jumlah tanggungan keluarga yang sedikit tetapi mereka dapat meningkatkan pendapatan dalam kawasan HKm. Hal ini disebabkan karena sebahagian responden memiliki umur dengan usia produktif jadi mereka tetap mampu bekerja sendiri.

4. Luas Lahan.

Luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi petani serta mempengaruhi bagaimana cara pengelolaan dari lahan itu sendiri. Luas lahan responden dalam kawasan hutan kemasyarakatan dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini :

Tabel 12. Luas Lahan yang Dikelola Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.

No	Luas Lahan(ha)	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	< 1,00	17	42,5
2	≥ 1,00	23	57,5
Jumlah		40	100

Tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa responden yang memiliki luas lahan kurang dari 1,00 ha sebanyak 17 responden atau 42,5 %. Sedangkan responden yang memiliki luas lahan sama atau lebih besar dari 1,00 ha sebanyak 23 responden atau sebesar 57,5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden sudah memiliki penguasaan lahan yang cukup luas sehingga semakin besar luas lahan yang digarap maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh.

C. Hasil Kegiatan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

1. Pendapatan dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan.

Pendapatan responden dalam kawasan hutan di Desa Kapita sangat beragam mulai dari responden dengan tingkat pendapatan terendah Rp. 2.350.000,- per tahun dan pendapatan responden dengan tingkat pendapatan tertinggi Rp. 16.800.000,- per tahun. Sumber pendapatan tersebut diperoleh dari hasil pemanfaatan kawasan hutan oleh responden. Dan pemanfaatan di dalam kawasan hutan yaitu pemungutan hasil hutan (pemungutan kayu bakar dan pemungutan hasil hutan bukan kayu) dan pemanfaatan kawasan hutan yaitu berkebun. Adapun rincian nilai penerimaan, biaya produksi, dan pendapatan bersih responden dalam kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini :

Tabel 13. Nilai Penerimaan, Biaya produksi, dan Pendapatan bersih Responden per Tahun di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.

No	Uraian	Nilai	Rata-Rata
1	Penerimaan	Rp. 265.300.000	Rp. 6.632.500
2	Biaya Produksi	Rp. 15.760.000	Rp. 394.000
3	Pendapatan Bersih	Rp. 249.540.000	Rp. 6.238.500

Pada Tabel 13, menunjukkan bahwa total penerimaan seluruh responden di Desa Kapita sebesar Rp. 265.300.000,- / tahun dan rata-rata penerimaan masing-masing responden sebesar Rp. 6.632.500,-/ tahun dan total biaya produksi sebesar Rp. 15.760.000,-/ tahun dengan rata-rata penerimaan masing-masing responden sebesar Rp. 394.000,-/ tahun Jadi total pendapatan bersih seluruh responden

sebesar Rp 249.540.000,- / tahun dengan rata-rata pendapatan bersih masing-masing responden sebesar Rp 6.238.500,- / tahun.

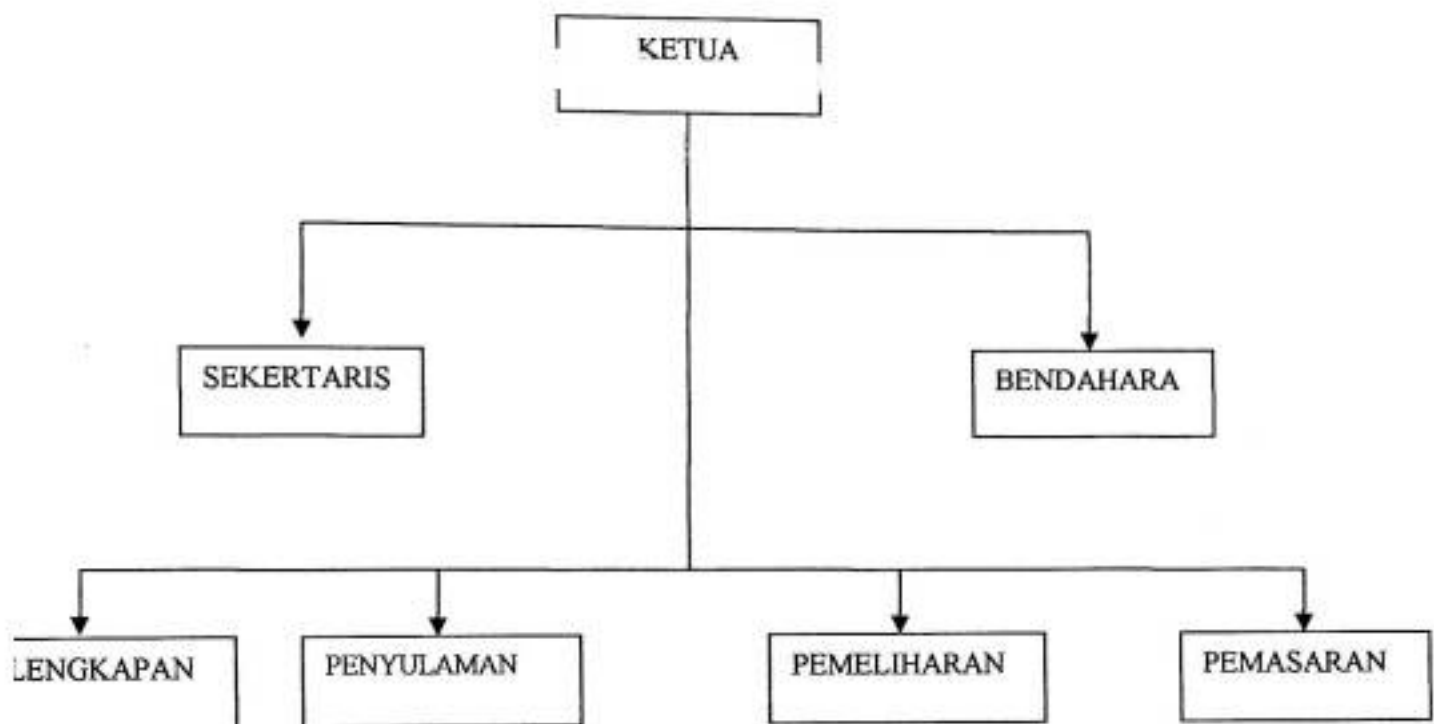
2. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Peserta Hutan Kemasyarakatan.

Kelembagaan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Suatu sistem kelembagaan yang efektif akan menghasilkan kerja yang efisien. Sistem kelembagaan yang efektif tercipta apabila didukung oleh satu struktur dan mekanisme kerja organisasi yang baik. Oleh karena itu maka pengembangan kelembagaan ini perlu diawali dengan pembentukan struktur organisasi, pembagian kerja dan mekanisme kerja organisasi.

a. Struktur Organisasi Kelompok Tani

Kelembagaan yang terbentuk dalam pelaksanaan pengembangan HKm di Desa Kapita adalah organisasi pengelolaan HKm yang diberi nama Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berjumlah 17 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 25 – 30 orang yang anggotanya merupakan masyarakat Kapita yang mengelola kawasan di dalam lokasi HKm. Alasan pembentukan kelompok tani hutan adalah untuk memudahkan pengorganisasian kegiatan, agar masyarakat yang terlibat dapat bekerjasama dalam satu kawasan pengembangan HKm. Adapun struktur organisasi dan aturan-aturan intern kelompok tani HKm dapat dilihat sebagai berikut:

STRUKTUR ORAGANISASI KELOMPOK TANI HUTAN



Gambar 2 : Struktur Organisasi Kelompok Tani Hutan.

b. Aturan-aturan Intern Kelompok Tani Hutan.

Aturan-aturan intern kelompok tani hutan di Desa Kapita adalah sebagai berikut :

3. Nama Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KT HKm) di Desa Kapita yaitu : Tana Keke, Batu Ejaya, Karaeng Tombang, Permata Hijau, Sinar Jaya Harapan, Ever Green, Baji Pamai, Minasa Te'ne, Julu Boritta, Julu Atia, Julu Cinitta, Julu Pangngai, Sipakatutu, Paraiatte, Jujurpaki Nabaji, Sipiurangi, Baji Minasa.

4. Syarat Keanggotaan.

- a. Keanggotaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KT HKm) adalah orang yang memiliki lahan di lokasi HKm Desa Kapita.
- b. Anggota KT HKm Adalah masyarakat yang tinggal disekitar lokasi HKm, memiliki KTP atau Surat keterangan domosili dari Pemerintahan setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota KTH telah memenuhi syarat keanggotaannya, hal ini disebabkan karena semua anggota KTH adalah masyarakat asli yang memang lahir dan besar di Desa Kapita sehingga tidak menjadi masalah dalam memenuhi syarat keanggotaannya.

5. Hak dan Kewajiban Keanggotaan.

- a. Hak Anggota Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan
 - Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam ancaman, gangguan yang berkaitan dengan lahan-lahan garapan dan hasilnya.
 - Berhak bicara dan mengajukan usul pada setiap pertemuan kelompok.
 - Memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok.
 - Berhak atas pengelolaan lahan dan hasilnya.
- b. Kewajiban Anggota Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan
 - Wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan kelompok
 - Wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam aturan intern kelompok, keputusan rapat dan peraturan khusus kelompok.

- Wajib menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban anggota KTH terlaksana karena setiap anggota masih menjunjung tinggi nama dan kehormatan, saling menghargai sesama anggota dan sifat kekeluargaan yang masih kuat jadi dalam setiap pengambilan keputusan bisa dilakukan secara musyawarah sehingga hasil yang diperoleh benar-benar aspirasi dari anggota KTH.

6. Kepengurusan Kelompok.

- a. Pengurus KTH terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara.
- b. Pengurus kelompok adalah anggota kelompok tani
- c. Pengurus dipilih melalui musyawara kelompok, periode pengurus 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode.
- d. Pengurus membuat laporan pertanggung jawaban dalam rapat tahunan.
- e. Apabila pengurus tidak melaksanakan kewajibannya, mengundurkan diri dan atau meninggal dunia maka anggota berhak mengadakan musyawara luar biasa (tiga bulan meninggalkan tugasnya tanpa sebab).

Hasil penelitian menunjukkan tidak semua kepengurusan kelompok dapat terlaksana dengan lancar seperti pada point d dan e yaitu pengurus membuat laporan pertanggung jawaban dalam rapat tahunan, Hal ini disebabkan karena tidak semua anggota aktif didalam kelompok tani hutan bahkan ada yang bermasa bodoh dalam kepengurusan kelompoknya apalagi sejak 4 tahun terakhir ini dimana pemerintah sudah menghentikan bantuan dan dukungannya sehingga kepengurusan kelompok

sudah diabaikan oleh pengurus KTH tersebut. Sedangkan dalam kepengurusan tidak melaksanakan kewajibannya, mengundurkan diri atau meninggal dunia maka anggota berhak mengadakan musyawarah luar biasa (tiga bulan meninggalkan tugasnya tanpa sebab) semua responden mengatakan tidak terlaksana karena tidak ada pengurus yang tidak melaksanakan kewajibannya, mengundurkan diri atau meninggal dunia.

7. Tugas Pengurus

a. Ketua KT Hkm yaitu:

- Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- Menandatangani surat-surat berharga dan surat-surat lain yang berkenaan dengan keuangan kelompok.
- Menjalankan tugas lain yang lazim dikerjakan oleh ketua

b. Sekertaris KT HKm bertugas

- Memelihara dan menjaga berita acara dan dokumen resmi kelompok
- Bertanggung jawab menyampaikan surat sebelum rapat dimulai
- Menjalankan tugas-tugas ketua apabila ketua tidak hadir,berhalangan dan atau keberatan melaksanakan kegiatannya.

c. Bendahara KT Hkm Bertugas

- Memelihara semua bukti-bukti keuangan, barang tanggungan dan jaminan, surat berharga dan barang lain yang menjadi milik kelompok.
- Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan dan atau dipindah tangankan dalam usaha kelompok.

- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun dan laporan pertanggungjawaban selama masa pengurusannya.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tugas pengurus yaitu ketua, sekertaris dan bendahara dapat terlaksana. Hal ini disebabkan karena pengurus KTH yang dipilih karena kesepakatan bersama dan pengurus yang terpilih betul-betul telah dianggap mampu dan dapat diandalkan oleh anggotanya.

8. Status Lahan

- a. Lahan HKm Negara adalah lahan yang dikelola oleh petani HKm yang tak bisa diperjualbelikan
- b. Lahan HKm dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang berdomisili di sekitar lokasi HKm dan memperoleh pengakuan dari pengurus melalui musyawarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua anggota KTH dalam status lahan pada KTH semua terlaksana. Hal ini disebabkan karena anggota KTH menyadari bahwa lahan yang mereka kelola dalam kawasan hutan merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya dipercayakan kepada mereka.



9. Sanksi-sanksi

- a. Apabila lahan ditelantarkan dan tidak dipelihara maka pengurus memberikan peringatan sebanyak 3 x secara tertulis, apabila tidak diindahkan maka keanggotaannya dicabut dari kelompok melalui musyawara kelompok.
- b. Setiap anggota yang tidak menanam tanaman jangka panjang dalam lahan garapannya selama 1 tahun terhitung sejak kesepakatan ini dibuat maka pengurus kelompok berhak mengambil alih lahan tersebut melalui musyawara kelompok.
- c. Setiap anggota yang menebang pohon dalam lahannya maupun lahan orang lain untuk dijadikan bahan bangunan/keperluan lain maka hasil tebangan disita oleh kelompok dan wajib mengganti tanaman sebanyak 10 (sepuluh) pohon serta denda sebesar Rp 50.000/pohon.
- d. Setiap anggota yang menebang kayu di hutan untuk dijadikan kebun atau memperluas kebunnya maka lahan bukaannya disita dan dihutankan kembali oleh kelompok serta palakunya memperoleh sanksi dari pengurus.
- e. Setiap anggota yang terbukti mencari hasil kebun orang lain harus mengembalikan hasil curiannya dan mengganti rugi berdasarkan kerugian yang diderita pemiliknya (kesepakatan) dan pelakunya diberi teguran dan pembinaan dari pengurus kelompok.

- f. Setiap anggota yang terbukti menadah hasil curian, harus mengembalikan barang tadahan tersebut atau mengganti rugi kepemilikannya (kesepakatan).
- g. Setiap anggota atau warga yang dengan sengaja atau tidak sengaja membakar hutan akan didenda sesuai tingkat kerugian yang diderita oleh pemilik lahan yang terbakar.
- h. Setiap anggota atau warga mengembala kambing atau sapi di lahan HKm dan merusak tanaman yang ada, maka akan dikenakan denda berupa uang tunai sesuai dengan tingkat kerusakan tanaman.
- i. Mengembalikan ternak dilahan orang lain (HKm) dikenakan sanksi Rp. 5.000/ ekor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua sanksi-sanksi terlaksana seperti sanksi pada point i yaitu mengembalikan ternak dilahan orang lain (HKm) dikenakan sanksi Rp. 5.000/ekor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kendala pada point i tidak terlaksana karena :

1. Sebahagian besar masyarakat Desa Kapita memiliki ternak yang dilepas begitu saja. Hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam keberhasilan tanaman.
2. Sebahagian besar masyarakat Desa Kapita masih menggunakan ternak dalam membajak sawahnya sehingga peranan hewan ternak masih sangat besar.
3. Masih kuatnya hubungan persaudaraan/kekeluargaan sehingga masyarakat menganggap masalah pada point i bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

c. Hubungan Kerja Sama antar Kelompok Tani Hutan.

Kelompok tani hutan yang terbentuk pada tahun 2000 awalnya berjalan dengan lancar dan sangat terorganisasi hal ini disebabkan karena anggota kelompok tani hutan sering mendapatkan pembinaan dari pemerintah dan LSM untuk memberikan motivasi kelompok-kelompok masyarakat, sehingga menjadi kelompok yang produktif dan mandiri. Namun semenjak 4 tahun terakhir ini kelompok tani hutan yang dibentuk dalam pengembangan HKm sampai saat ini sudah tidak berjalan dengan lancar bahkan bisa dikatakan mati suri. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota kelompok tani, hal ini disebabkan karena tidak adanya lagi perhatian dari pemerintah dan LSM dan kurangnya kesadaran anggota kelompok tani dalam menjalankan kelompok tani hutan tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dalam jumlah pelaksanaan rapat pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Jumlah Pelaksanaan Rapat dalam KTH di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto

No	Nama KTH	Jumlah Pelaksanaan Rapat dari Tahun 2000-2008								
		00	01	02	03	04	05	06	07	08
1	Tana keke	12	12	12	4	4	1	-	-	-
2	Batu ejaya	12	12	12	4	4	1	-	-	-
3	Karaeng tombang	12	12	12	4	4	-	-	-	-
4	Permata hijau	12	12	12	4	3	-	-	-	-
5	Sinar jaya harapan	12	12	12	4	3	-	-	-	-
6	Ever Green	12	12	12	4	4	-	-	-	-
7	Baji Pamai	12	12	12	4	4	1	-	-	-
8	Minasa Te'ne	12	12	12	4	4	1	-	-	-
9	Julu Boritta	12	12	12	4	3	-	-	-	-
10	Julu Atia	12	12	12	4	2	-	-	-	-
11	Julu cinitta	12	12	12	4	2	-	-	-	-
12	Julu pangngai	12	12	12	4	4	-	-	-	-
13	Sipakatutu	12	12	12	4	2	-	-	-	-
14	Paraikatte	12	12	12	4	2	-	-	-	-
15	Jujurpakinabaji	12	12	12	4	1	-	-	-	-
16	Sipiurangi	12	12	12	4	1	-	-	-	-
17	Baji Minasa	12	12	12	4	4	1	-	-	-

Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan rapat pada kelompok tani hutan pada tahun 2000 sampai 2002 berjalan lancar sebulan sekali. Pada tahun 2003 pelaksanaan rapat yang dilaksanakan sebulan sekali berubah menjadi tiga bulan sekali karena kesepakatan bersama. Pada tahun 2004 KTH Tanakeke, Batu ejaya, Karaeng tombang, Minasa baji, Minasa te'ne, Julupangai, Baji minasa masih tetap melaksanakan rapat sekali dalam tiga bulan dan KTH Permata hijau, Sinar jaya harapan, Julu boritta, Julu atia, Julu cinitta, Sipakatutu dan Paraikatte melaksanakan rapat dua kali dalam setahun, sedangkan KTH Jujurpakinabaji dan Sipiurangi hanya melaksanakan rapat sekali dalam setahun bahkan ada yang sama sekali tidak melaksanakan rapat yaitu KTH Every green. Pada tahun 2005 ketidakaktifan

kelompok tani hutan semakin terlihat karena pelaksanaan rapat hanya dilakukan sekali dalam setahun oleh KTH Tana keke, Batu ejaya, Baji pamai dan Minasa tene dan KTH yang lain sudah tidak pernah melaksanakan rapat lagi. Kondisi ini terus berlangsung dari tahun 2006 sampai sekarang, dimana KTH yang ada sudah tidak pernah melaksanakan rapat lagi. Dan beberapa alasan anggota KTH tidak pernah melaksanakan rapat adalah:

1. Anggota KTH sejak 4 Tahun terakhir ini sudah tidak pernah mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah lagi. Dukungan yang dimaksud baik berupa finansial ataupun teknis.
2. Anggota KTH belum bisa mandiri dan memiliki inisiatif sendiri untuk tetap mempertahankan keaktifan KTHnya meskipun tanpa perhatian dan dukungan dari pemerintah.
3. Sebahagian anggota KTH menganggap tidak perlu lagi diadakan rapat mengingat hampir semua tanaman sudah berada pada fase produktif dan aman sehingga tanaman tidak perlu lagi mendapat penanganan yang intensif.

Namun kenyataannya, meskipun organisasi kelompok tani hutan tidak berjalan lancar seperti dulu lagi, tapi dari segi pendapatan masyarakat sudah mampu memperoleh hasil dari dalam kawasan HKm untuk dijadikan sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Ekologi

Berdasarkan hasil penelitian, aspek ekologi pada kawasan hutan kemasyarakatan di Desa Kapita telah jauh mengalami peningkatan. Karena kawasan yang dulunya tandus, gersang tanpa adanya teknik konservasi tanah sekarang sudah ditumbuhi banyak vegetasi dengan teknik konservasi yang rapi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4 . (Gambar sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pilot Project pembangunan HKm di Desa Kapita).

a. Aspek Vegetasi

Berdasarkan aspek ekologi kawasan HKm di Desa Kapita telah mengalami peningkatan, karena kawasan yang dulu begitu tandus sekarang sudah ditumbuhi banyak vegetasi. Secara umum vegetasi di lokasi HKm terdiri dari dua jenis yaitu vegetasi alami dan vegetasi hasil budidaya. Vegetasi alami terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi tumbuhan bawah. Vegetasi budidaya terdiri atas vegetasi hasil budidaya tanaman, seperti tanaman tahunan termasuk tanaman buah-buahan/MPTS dapat dilihat pada Lampiran 3 Gambar 5, 6 dan 8, tanaman kehutanan/ kayu-kayuan dapat dilihat pada Lampiran 3 Gambar 5, dan 7. dan tanaman semusim yang dapat dilihat pada Lampiran 3 Gambar 6.

Tanaman semusim seperti ubi kayu, jagung, kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan berbagai jenis sayur-sayuran. Selain itu terdapat juga tanaman tahunan termasuk tanaman buah-buahan dalam jumlah terbatas seperti kemiri, jambu mente, asam, kapok, nangka, kopi, mangga dan lain-lain. Sedangkan jenis tanaman kehutanan/kayu-kayuan yang ditemukan di daerah ini adalah akasia, jati lokal,

mahoni, eucalyptus dan beberapa jenis lokal. Jenis-jenis vegetasi yang ditanam di lokasi HKm di Desa Kapita secara rinci dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Jenis Vegetasi yang Terdapat di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

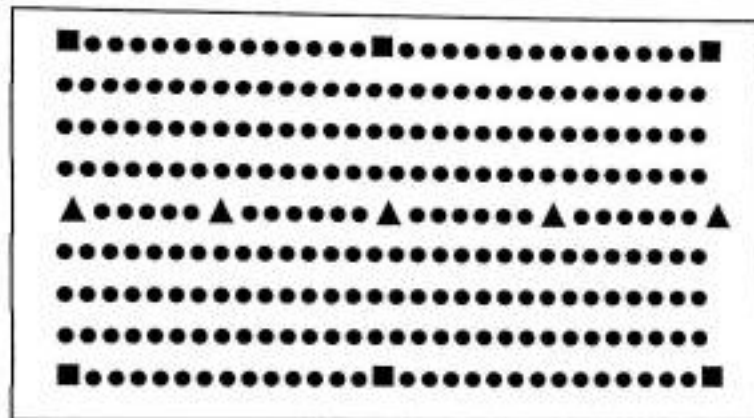
Jenis Kayu – kayuan	Tanaman Tahunan/ Buah-buahan/ MPTS	Tanaman Semusim
Gmelina Jati Lokal Mahoni Eucalyptus Caliandra Lamtoro Akasia	Mangga Jambu mente Kemiri Kapuk Nangka Asam Langsat	Lombok Jagung Kacang hijau Kacang tanah Kacang kedelai Ubi kayu

b. Teknik Konservasi Tanah

Teknik konservasi tanah yang diterapkan oleh anggota kelompok tani di lokasi hutan kemasyarakatan Desa Kapita adalah secara vegetatif dan secara mekanik. Teknik konservasi tanah secara vegetatif yang diterapkan adalah dengan cara penanaman jenis tanaman jenis kayu-kayuan (gmelina, jati lokal, mahoni, eucalyptus, caliandra, lamtoro, dan akasia), Tanaman tahunan/buah-buahan/ MPTS (mangga, jambu mente, kemiri, kapuk, nangka, asam dan lansat) dan Tanaman semusim (lombok, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai dan ubi kayu). Jenis tanaman tersebut ditanam bercampur dengan pohon-pohon berbuah dan tanaman semusim.

Sistem tanam di lokasi HKm adalah sistem agroforestry dengan jarak tanam untuk jenis tanaman tahunan/MPTS (jambu mente dan kemiri) 5 m x 5 m, jenis tanaman sela seperti caliandra dan lamtoro adalah 2,5 m x 5 m. Tanaman semusim

ditanam diantara tanaman kayu-kayuan dan tanaman MPTS dengan pola seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Pola Tanam di lokasi HKm

Keterangan : ■ : MPTS
 ▲ : Kayu-kayuan
 ● : Tanaman semusim

Pola tanam di atas menunjukkan kerapatan tanaman yang ada di lokasi HKm, yang bertujuan melindungi tanah dari pukulan air hujan langsung ke permukaan tanah. Dengan tanam seperti ini maka dampak curah hujan terhadap erosi dapat diminimalkan.

Pada teknik konservasi tanah secara mekanik yang ditemukan di lokasi HKm berupa teras bangku dan teras gulud. Bentuk konservasi tersebut bertujuan untuk melindungi tanah dari aliran permukaan sehingga walaupun terjadi erosi akan dialirkan ke saluran teras secara teratur. Model teras bangku dan teras gulud yang ditemukan di lokasi dapat dilihat pada Lampiran 3 Gambar 1, 2, 3, dan 4.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan HKm di Desa Kapita adalah konflik lahan, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, rendahnya penerapan teknologi dalam pengelolaan usaha tani, kebakaran hutan dan ternak.
2. Dengan adanya Pilot Project pembangunan HKm, maka masyarakat Desa Kapita telah memperoleh rata-rata pendapatan sebesar Rp. 6.238.500/ tahun dan kawasan hutan sebelum diadakannya Pilot Project HKm yang dulunya tandus, sekarang banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Sedangkan kelompok tani hutan yang dibentuk dalam Pilot Project pembangunan HKm sudah tidak berfungsi sesuai tujuan pembentukan kelompok tani hutan tersebut.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka diharapkan adanya penguatan kelompok tani hutan sehingga kelompok tani hutan dapat berjalan lancar seperti dulu lagi.
2. Diharapkan adanya dukungan dari pemerintah/LSM baik berupa penyuluhan dan peningkatan kemampuan teknologi demi pengembangan HKm.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. Ensiklopedi Ekologi Indonesia. Diakses 28 Agustus 2008. Makasar.
- Anonim, 1986. Ruang Lingkup Pengertian Hutan Kemasyarakatan. Jurnal penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1996. Materi Penyuluhan Kehutanan I. Pusat Penyuluhan Kehutanan, Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Dinamika Proses Lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. undang-undang sebagai ketentuan pelaksanaannya (UUPK). Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan 2001. Keputusan Menteri No. 31 tahun 2001. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Fitriani. 2008. Analisis Produksi dan Pendapatan Usahatani Semangka (*Citrullus vulgaris*, Schard). Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Manwan, I., Syam, M., M. H., Saefuddin, A. 1988. Kepas Study On Agroecosystems Approach To Deal With Diversity in The Uplands of East Java. Summary and Conclusions. Kepas. Bogor.
- Prakoso, Muhammad., 1995. Rencana Kebijakan Kehutanan. Aditya Media, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Makassar.
- Ritchie, B., Cyntia, Mc Dougall, Mandy, Haggith, Nicolette, dan B. de Olivera, 2001. Kriteria dan indikator Kelestarian Hutan yang dikelola Oleh Masyarakat. Center for International Forestry Research (CIFOR), Jakarta.

- Sajogyo. 1977. Garis Kemiskinan Kebutuhan Minimum Pangan. Lembaga Penelitian Sosial Pedesaan. IPB, Bogor.
- Sathapraja. 1982. Agroforestry di Indonesia (Suatu Usaha Terpadu Kehutanan dan Budidaya Pertanian Lainnya untuk Meningkatkan Kemakmuran Petani di Sekitar Hutan). Jurnal Litbang Pertanian Volume I (2). Jakarta.
- Sanchez, Pedro A.,1992. Sifat dan pengelolaan Tanah Tropika. Penerbit ITB, Bandung.
- Soerjono, R. 1986. Ruang Lingkup Pengertian Kehutanan Kemasyarakatan (Scope and Defenition Community Forestry). Jubal Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Volume II (2). Jakarta.
- Sonja Vermeulen. 2001. Memahami KF: lima hal pokok yang perlu dipertimbangkan. Embarking on komuniti forestri: five points to keep in mind. IIED
- Suharjito, D., K. Azis, D. Wigono, S. Martua, dan E. Santi, 2000. Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat. Aditya Media, Yogyakarta.

Lampiran 1. Tabel Identitas Responden di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

No	Nama responden	Umur	Pendidikan	Jumlah tanggungan	Luas lahan (Ha)
1	Baso dg. Situju	42	SMA	4	0.75
2	Abd. Karim	37	SMP	4	1
3	Dg. Ledeng	47	SD	1	0.5
4	Ahmad	30	SMA	2	1
5	Alwi Said L	31	SMA	5	1
6	Dg. Gassing	43	SD	3	0.75
7	Abd. Asis Nai	32	SMP	4	0.5
8	Zainuddin	30	SD	3	0.5
9	Yazan N dg Lau	45	SD	4	0.5
10	Syamsu dg. Lallo	54	SMP	6	2
11	Sangkala	40	SD	4	0.5
12	Saharuddin	30	SMP	3	1
13	Abd. Kadir	48	SI	3	2
14	Usman	28	SMA	2	0.5
15	Dg. Rahi	50	SD	1	1
16	Jaharuddin	48	SD	2	1
17	Sampara	42	SD	3	1
18	Sainuddin	35	SMP	4	1
19	Bakri Hasan	43	SD	2	1
20	Rabanai	30	SD	3	0.5
21	Dg. Ngupa	55	SD	1	0.5
22	Abdullah dg Talli	35	SMA	4	1
23	Dg. Siang	43	SD	1	0.75
24	Zahuddin	35	SMA	2	1
25	Dg. Manna	46	SMP	6	1.5
26	Ali wardana	41	SMP	3	0.5
27	Samula	70	-	1	1
28	Dg sarre	60	SD	1	1
29	Rukka dg. Rowa	45	SD	3	0.55
30	Yusri	37	SD	4	0.5
31	Kamil dg ngalle	55	SMA	3	0.25
32	Abd. Malik	45	SD	2	0.75
33	Damsir	30	SMA	3	0.5
34	Saharuddin	35	SD	3	2
35	Haruna dg sudang	60	SD	4	1.5
36	Ci'ri	49	SD	4	1
37	M. Asmar	43	SMA	5	3
38	Rahman	50	SD	7	1
39	Juhan dg Rapa	55	SD	5	1
40	Bakka	42	SD	4	1
Jumlah				129	38.3

lampiran 2. Tabel Pendapatan Responden Per Tahun di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, 2008.

No	Nama responden	Pendapatan dalam kawasan hutan	Biaya produksi	Total pendapatan bersih
1	Baso dg. Situju	10.200.000	850.000	9.350.000
2	Abd. Karim	7.000.000	500.000	6.500.000
3	Dg. Ledeng	5.000.000	300.000	4.700.000
4	Ahmad	5.000.000	300.000	4.700.000
5	Alwi Said L	6.000.000	350.000	5.650.000
6	Dg. Gassing	6.500.000	300.000	6.200.000
7	Abd. Asis Nai	4.000.000	300.000	3.700.000
8	Zainuddin	5.600.000	350.000	5.250.000
9	Yazan N dg Lau	4.500.000	400.000	4.100.000
10	Syamsu dg. Lallo	11.000.000	850.000	10.150.000
11	Sangkala	6.000.000	350.000	5.650.000
12	Saharuddin	7.000.000	250.000	6.750.000
13	Abd. Kadir	7.500.000	400.000	7.100.000
14	Usman	5.000.000	300.000	4.700.000
15	Dg. Rahi	4.500.000	250.000	4.250.000
16	Jaharuddin	4.500.000	200.000	4.300.000
17	Sampara	7.000.000	300.000	6.700.000
18	Sainuddin	7.000.000	340.000	6.660.000
19	Bakri Hasan	6.000.000	500.000	5.500.000
20	Rabanai	3.500.000	200.000	3.300.000
21	Dg. Ngupa	4.000.000	300.000	3.700.000
22	Abdullah dg Talli	6.500.000	300.000	6.200.000
23	Dg. Siang	6.000.000	250.000	5.750.000
24	Zahuddin	7.000.000	300.000	6.700.000
25	Dg. Manna	7.500.000	300.000	7.200.000
26	Ali wardana	5.000.000	250.000	4.750.000
27	Samula	6.500.000	300.000	6.200.000
28	Dg sarre	7.000.000	350.000	6.650.000
29	Rukka dg. Rowa	6.500.000	250.000	6.250.000
30	Yusri	4.500.000	300.000	4.200.000
31	Kamil dg ngalle	2.500.000	150.000	2.350.000
32	Abd. Malik	5.000.000	250.000	4.750.000
33	Damsir	4.500.000	270.000	4.230.000
34	Saharuddin dg. Tinggi	15.000.000	1.000.000	14.000.000
35	Haruna dg sudang	10.000.000	800.000	9.200.000
36	Ci'ri	7.000.000	500.000	6.500.000
37	M. Asmar	18.000.000	1.200.000	16.800.000
38	M. Asmar	7.500.000	400.000	7.100.000
39	Rahman	7.500.000	400.000	7.100.000
40	Juhan dg Rapa	5.000.000	300.000	4.700.000
	Bakka			
	Jumlah	265.300.000	15.760.000	249.540.000
	Rata-rata	6.632.500	394.000	6.238.500

Lampiran 3. Gambar Vegetasi dan Bentuk Konservasi di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.



Gambar 1. Model Teras di Lokasi HKM



Gambar 2. Model Teras di Lokasi HKM



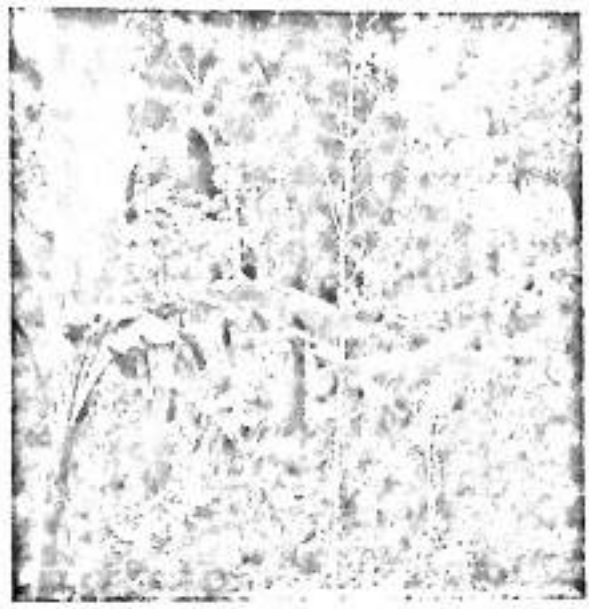
Gambar 3. Model Teras di Lokasi HKM



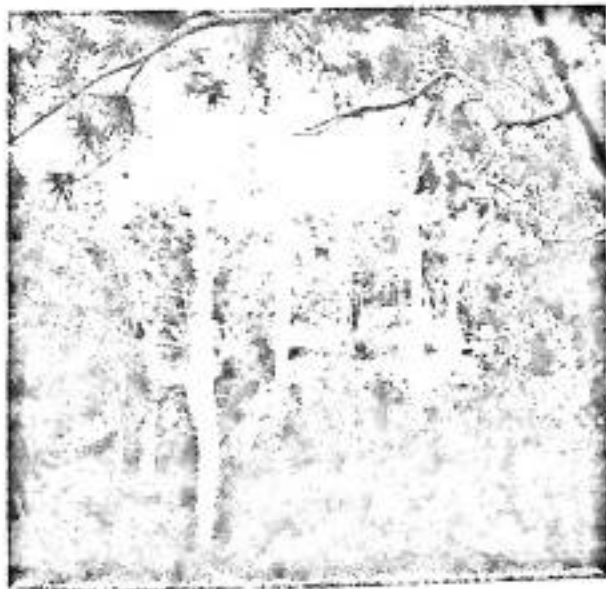
Gambar 4. Model Teras di Lokasi HKM



Gambar 5. Kombinasi tanaman tahunan atau buah-buahan dan tanaman kehutanan/kayu-kayuan



Gambar 6. Kombinasi tanaman semusim dan tanaman tahunan/buah-buahan



Gambar 7. Tanaman jati putih sebagai salah satu tanaman kehutanan atau kayu-kayuan



Gambar 8. Tanaman jambu menta sebagai tanaman buah-buahan dengan jarak tanam 5x5m

Gambaran 4. Gambar Kawasan Hutan Sebelum dilaksanakan Pilot Project Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.



Gambar 1. Kawasan hutan sebelum pelaksanaan Pilot Project HKM di Desa Kapita



Gambar 2. Kawasan hutan sebelum pelaksanaan Pilot Project HKM di Desa Kapita



Gambar 3. Kawasan hutan sebelum pelaksanaan Pilot Project HKM di Desa Kapita



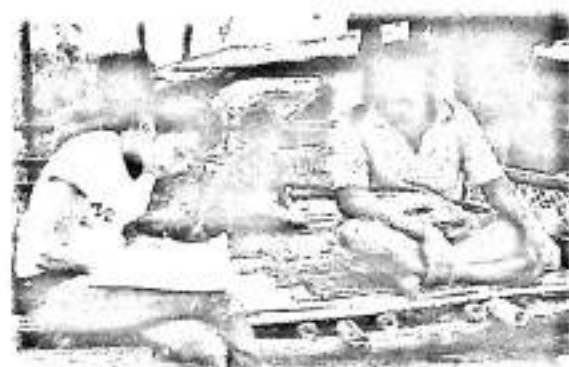
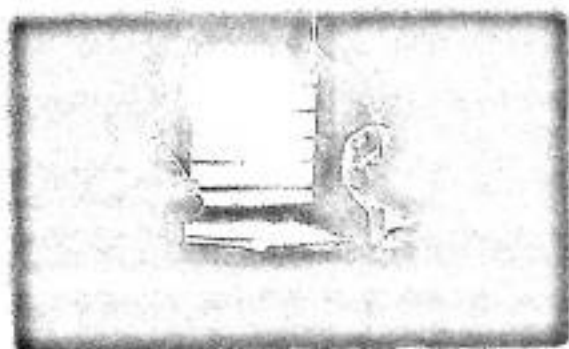
Gambar 4. Kawasan hutan sebelum pelaksanaan Pilot Project HKM di Desa Kapita

Lampiran 5. Kendala-kendala dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

No	Nama Responden	Konflik Lahan	Kendala dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan		Keberhasilan Tanaman	
			Ketertanggung terhadap pemerintah	Kelembagaan Rendahnya kemampuan teknologi dan pengelolaan usaha tani	Ternak	Kebakaran hutan
1	Baso dg. Sitiyu	✓			✓	✓
2	Abd. Karim				✓	✓
3	Dg. Ledeng		✓		✓	✓
4	Ahmad			✓	✓	✓
5	Alwi Said L				✓	✓
6	Dg. Gassing	✓	✓	✓	✓	✓
7	Abd. Asis Nai		✓		✓	✓
8	Zainuddin	✓	✓		✓	✓
9	Yazan N dg Lau	✓	✓		✓	✓
10	Syamsu dg. Lallo		✓		✓	✓
11	Sangkala	✓	✓		✓	✓
12	Saharuddin		✓		✓	✓
13	Abd. Kadir		✓		✓	✓
14	Usman				✓	✓
15	Dg. Rahi	✓	✓		✓	✓
16	Jaharuddin	✓	✓	✓	✓	✓
17	Sampara	✓	✓	✓	✓	✓

18	Sainuddin		✓				✓	✓
19	Bakri Hasim		✓	✓		✓	✓	✓
20	Rabunai		✓	✓		✓	✓	✓
21	Dg. Ngupa		✓	✓		✓	✓	✓
22	Abdulrah dg Tali			✓			✓	✓
23	Dg. Siang					✓	✓	✓
24	Zahuddin		✓	✓			✓	✓
25	Dg. Manna		✓	✓			✓	✓
26	Ali wardana						✓	✓
27	Sannula			✓		✓	✓	✓
28	Dg sarre		✓	✓			✓	✓
29	Rukka dg. Rowa		✓	✓			✓	✓
30	Yusri			✓		✓	✓	✓
31	Kamil dg ngalle			✓			✓	✓
32	Abd. Malik			✓		✓	✓	✓
33	Damsir			✓			✓	✓
34	Saharuddin			✓		✓	✓	✓
35	Haruna dg sudang			✓			✓	✓
36	Cih			✓		✓	✓	✓
37	M. Asmar			✓			✓	✓
38	Rahman			✓		✓	✓	✓
39	Juhan dg Rapa		✓	✓		✓	✓	✓
40	Bakka		✓	✓			✓	✓
	Jumlah	17		32		15	40	40

Lampiran 6. Gambar/ Dokumentasi saat Melakukan Wawancara Dengan Beberapa Responden



QUSIONER PENELITIAN

IDENTIFIKASI PERKEMBANGAN PILOT PROJECT HKM DI DESA KAPITA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO

A. IDENTIFIKASI RESPONDEN/ MASYARAKAT

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Tingkat pendidikan :
6. Tingkat pendapatan :
7. Luas lahan garapan :
8. Jumlah tanggungan keluarga :

B. PENGETAHUAN DASAR MASYARAKAT TENTANG HKm

1. Apakah bapak pernah mendengar program HKm : Ya Tidak
2. Jika ya dari mana bapak tahu:
 - a. Penyuluh
 - b. Kepala Desa
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Sesama petani
 - e.
3. Apakah bapak tahu tujuan tersebut : Ya Tidak
4. Jika ya coba sebutkan tujuan tersebut :

5. Apakah bapak setuju dengan program HKm: Setuju

Tidak setuju

6. Alasan setuju :

7. Alasan tidak setuju :

8. Jika alasan tidak, apakah bapak bersedia menjadi peserta program HKm ?

Ya

Tidak

9. Jika ya usaha apa yang bapak ingin lakukan :

**C. PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG OECSF
(Overseas Economic Cooperation Fund)**

1. Apakah bapak tahu tentang program OECSF? Ya

Tidak

2. Jika ya, apa yang bapak ketahui ?

3. Darimana bapak mendapatkan pengetahuan itu

a. Penyuluh

b. Kepala Desa

c. Tokoh Masyarakat

d. Sesama Petani

e.

D. ASPEK EKONOMI, SOSIAL DAN EKOLOGI

1. Apakah bapak bekerja / menggarap lahan di hutan? Ya

Tidak

2. Jika Ya berapa luasannya : ha

3. Jenis-jenis tanaman apa yang bapak tanam?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
4. Berapa besar pendapatan yang bapak dapatkan : Rp
5. Berapa besar biaya produksi yang bapak keluarkan : Rp
 - a. Modal
 - b. Tenaga Kerja
 - c. Sewa Lahan.
6. Apakah pendapatan bapak meningkat dengan adanya pilot proyek HKm dari yayasan OECF?
7. Lembaga apa yang terlibat pada kegiatan HKm ? sebutkan?
8. Apakah bapak menjadi salah satu anggota dalam lembaga HKm ?
9. Apa saja yang termasuk dalam aktivitas lembaga tersebut? Sebutkan :
Bagaimana aktivitasnya :
10. Sebutkan aturan-aturan yang ada dalam lembaga tersebut ?
 - a. Bagaimana syarat keanggotaannya? Terlaksana

Tidak terlaksana

- b. Bagaimana hak dan kewajiban keanggotaannya? Terlaksana Tidak terlaksana
- c. Bagaimana kepengurusan kelompok? Terlaksana Tidak terlaksana
- d. Bagaimana tugas pengurus :
- a. Ketua : Terlaksana Tidak terlaksana
- b. Sekertaris : Terlaksana Tidak terlaksana
- c. Bendahara : Terlaksana Tidak terlaksana
- e. Bagaimana status lahannya? Terlaksana Tidak terlaksana
- f. Bagaimana sanksi-sanksi? Terlaksana Tidak terlaksana
11. Manfaat-manfaat apa saja yang bapak dapatkan dengan adanya lembaga tersebut?

E. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENGEMBANGAN HKm

1. Apakah pernah terjadi kendala yang terkait dalam status lahan?

Jika Ya, Kendala apa?

Tidak,

2. Apakah pernah terjadi kendala dalam kelembagaan ?

Jika Ya, Kendala apa?

Tidak

3. Apakah pernah terjadi kendala dalam keberhasilan tanaman

Jika Ya, Kendala apa?

Tidak.

Saran-saran bapak dalam pengembangan HKm ?